



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI ISWANTI**
2. Jabatan : **AUDITOR MADYA**
3. NHK : **51021**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 585.000.000**

1. Tanah Seluas 606 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 606 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 606 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 606 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 606 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 606 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 275.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000



5. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
6. MOBIL, DAIHATSU MOBIL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
7. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
8. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
9. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.717.670
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	882.217.670
III. HUTANG	Rp.	140.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	742.217.670

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.